



Provinsi Kepulauan Riau  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir **RANHIR**  
**RENJA** Rencana Kerja  
Tahun 2025



<https://bpbd.kepriprov.go.id>

Jalan Tugu Pahlawan No. 18 , Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan  
Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang



## **KATA PENGANTAR**

Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Kepulauan Riau dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Oleh karena itu Ranhir Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau ini berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan Program Kegiatan hingga Sub Kegiatan BPBD Provinsi Kepulauan Riau.

Ranhir Renja pada BPBD Provinsi Kepulauan Riau ini sebagai penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, merupakan sebuah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang Penanggulangan Bencana dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Dokumen ini berisikan Ranhir Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan untuk memastikan bahwa Indikator Kinerja Program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

Tanjungpinang, 4 Juli 2024

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

  
**Dr. MUHAMMAD HASBI, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660228 198602 1 006

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	21
2.3. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	23
2.4. Review Rancangan Awal RKPD .....	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	25
<b>BAB III    TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>35</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	35
3.2. Tujuan dan Sasaran .....	37
3.3. Program dan Kegiatan .....	39
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB VI    PENUTUP .....</b>	<b>48</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 .....	15
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Kepulauan Riau	22
Tabel 2.3.	Review Rancangan Awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 .....	26
Tabel 2.4.	Usulan Program, Kegiatan Masyarakat Tahun 2024 .....	32
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 .....	38
Tabel 4.1.	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026.....	41

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja .....	3
---	---



## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dengan amanat Undang-undang 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi dan terpadu sebagai dasar Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai sejak Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Pasca implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana di Indonesia dilaksanakan secara preventif bukan responsif, artinya yang diperkuat adalah pencegahan dan kesiap-siagaan dalam menghadapi bencana.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, BPBD Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, adapun tugas dimaksud sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
3. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
4. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
5. koordinasi kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pasal 362 bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu:

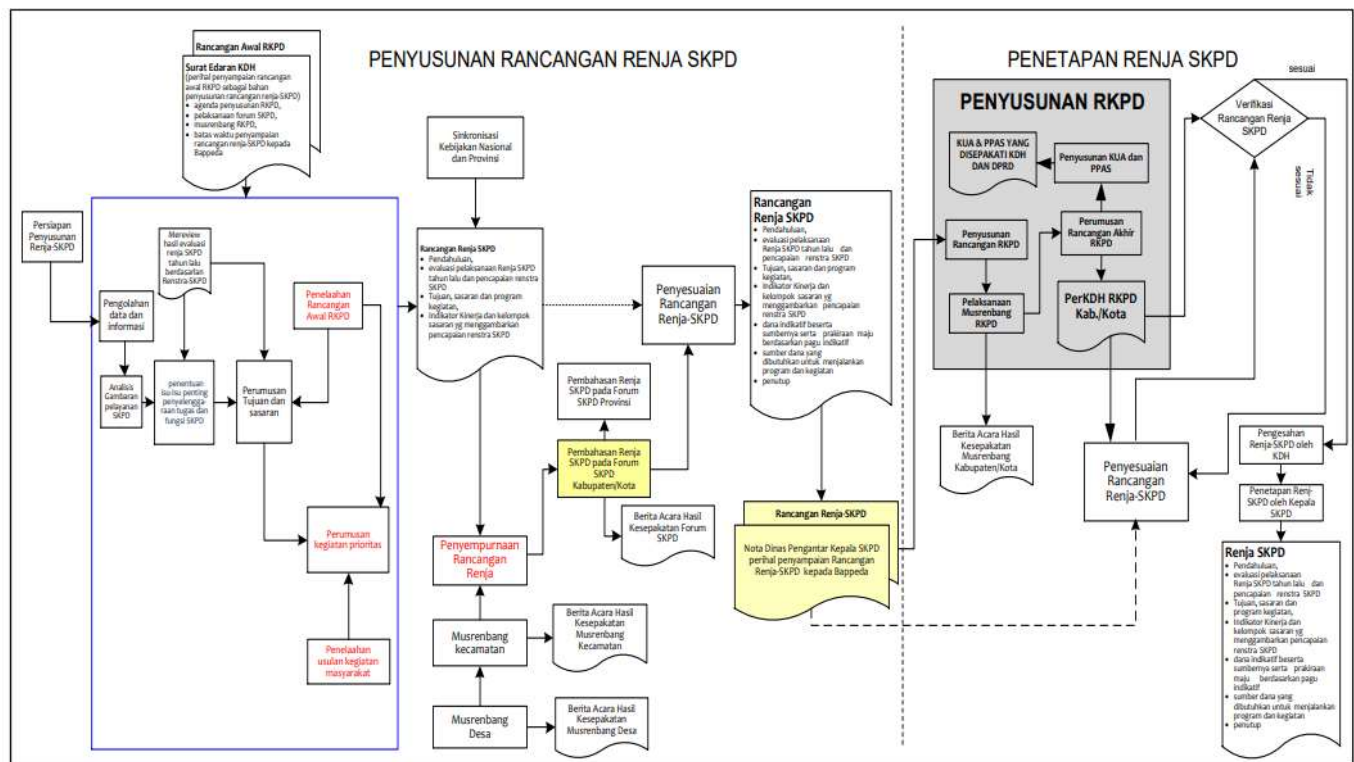
- a. Kepala Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
- c. Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah dan membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana, kepala Badan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.

Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja BPBD merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) BPBD yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2021 - 2026. Renja BPBD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan di laksanakan oleh BPBD dalam satu tahun anggaran. Renja BPBD menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja BPBD juga mengakomodir hasil Rapat Koordinasi Perangkat Daerah.

**Gambar 1.1**  
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Tahapan penyusunan Renja BPBD tahun 2024 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta



Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Sejalan dengan visi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”**.

BPBD melalui Program Penanggulangan Bencana berkaitan dengan misi 2 (dua) RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026 yaitu ‘Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Dalam hal ini yang perlu digaris bawahi adalah kata **‘Pelayanan’**, yang berarti bahwa pemerintah daerah melalui BPBD bertanggungjawab memberikan Pelayanan perlindungan terhadap masyarakat Provinsi Kepulauan Riau agar tercipta rasa aman.

Rencana kerja BPBD Provinsi Kepulauan Riau memiliki keterkaitan dengan kebijakan Nasional khususnya dengan Renstra dan Renja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan beberapakali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomer 67 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 885);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 63);
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 962);
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 981).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebagai berikut:

## **1. Maksud**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja adalah Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke dalam Rencana Tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah.

## **2. Tujuan**

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategis dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar melakukan evaluasi kinerja tahun 2025.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebagai berikut:

#### **Bab I   Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

#### **Bab II   Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja**

Bab ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

#### **Bab III   Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2025**

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; Program dan Kegiatan tahun 2025.

#### **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang Faktor pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; rekapitulasi program dan kegiatan; rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya; Tabel rencana program dan kegiatan.

#### **Bab V Penutup**

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025.



## **BAB. II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau berjalan dengan baik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi mengelola anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 12.933.437.201,-** dengan realisasi anggaran sampai dengan Akhir Tahun Anggaran sebesar **Rp. 12.699.183.381,-** atau sebesar **98,44 %**, dan realisasi kinerja sebesar **99,09 %**.

Berikut Uraian Realisasi Capaian Indikator Program Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Kepulauan Riau Daerah Tahun 2023:

a. Indeks Pencegahan Bencana;

Target Indikator Indeks Pencegahan Bencana Tahun 2023 yaitu 2,46 dengan Capaian 2,66 atau 108,13 % dengan kategori Sangat Tinggi, berdasarkan perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2023 untuk Indeks Pencegahan Bencana melebihi target di karenakan pencapaian penyusunan dokumen pencegahan bencana Provinsi serta Kabupaten/ Kota mampu terselesaikan;

b. Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan;

Target Indikator Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Tahun 2023 yaitu 0,40 dengan Capaian 0,64 atau 160 % dengan kategori Sangat Tinggi, berdasarkan perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2023 untuk Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan melebihi target di karenakan BPBD selaku Koordinator Urusan Kebencanaan mampu menyelesaikan Dokumen serta pelaksanaan Pemulihan Pasca Bencana Alam yang terjadi Sepanjang tahun 2023;

c. Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana.

Target Indikator Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Tahun 2023 yaitu 0,30 dengan Capaian 0,27 atau 90 % dengan kategori Tinggi, berdasarkan perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2023 untuk Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Belum memenuhi target di karenakan Dokumen Rencana Kontijensi, Gladi Kesiapsiagaan serta Aktivasi Sistem Komando yang merupakan SPM Sub urusan Kebencanaan belum dapat di laksanakan.

Terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang indikator capaiannya tidak terlaksana yaitu sub kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi, hal ini di karenakan Penganggaran terhadap sub kegiatan tersebut sudah tersedia namun terjadi defisit anggaran sehingga mengharuskan Recofusing pada belanja Tahun Anggaran 2023.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 dan capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1. Daftar program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan meliputi:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
  - Pendidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
  
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - Penyediaan Bahan/ Material;
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
  
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
  
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

**B. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**

- 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi;
  - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana).
  
- 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
  - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
  - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
  - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana;
  - Pengelolaan Risiko Bencana;
  - Penanganan Pascabencana Provinsi;
  - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana;
  - Penyusunan Rencana Kontijensi.
  
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
  - Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana;
  - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
  - Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/ Wabah Penyakit.
  
- 4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.
  - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah;
  - Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana;
  - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi.

2. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a. Komitmen dan kerjasama dari pimpinan, pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan waktu yang telah ditetapkan.

- b. Dukungan Perangkat Daerah terkait dan pemerintah kabupaten/ kota dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Capaian Renstra secara umum dari awal Renstra Priode 2021 - 2026, dengan capaian pada seluruh kegiatan dapat tercapai sesuai apa yg ditargetkan pada tahun 2023.
4. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada penyusunan Renja tahun 2025, perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan/ sub kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja kedepannya.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah s/d 2024 terlihat pada Tabel 2.1.

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**  
**RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

**Tabel 2.1.**  
**Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024**

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja 2023			Target 2024	Perkiraan Capaian Target s/d 2024	
										Target	Realisa si	Tingkat (%)		Realisa si Capaian	Tingkat (%)
1					2	3	3.a	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	%	100	100	100	99,09	99,09	100	100	99,77
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	17	3	3	3	100	3	9	52,94
1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	3	2	2	100	2	7	53,85
1	05	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	0	0
1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian KinerjaJadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	2	1	1	100	1	4	50,00
1	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	16	2	2	2	100	4	8	50,00
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	11	2	1	1	100	3	6	54,54
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	24	24	24	24	100	24	24	66,66
1	05	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	10	2	2	2	100	2	6	60,00
1	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	5	0	0	0	0	1	1	20,00
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	3	0	1	1	100	0	1	33,33



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**  
**RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja 2023			Target 2024	Perkiraan Capaian Target s/d 2024	
						Target	Realisa si	Tingkat (%)		Realisa si Capaian	Tingkat (%)
1	2	3	3.a	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 05 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	6	0	2	2	100	0	2	33,33
1 05 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	0	2	2	100	0	2	20,00
1 05 01 1.05 00011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	8	0	0	0	0	0	0	0
1 05 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	1	1	100	1	3	60,00
1 05 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100	1	3	60,00
1 05 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	1	1	1	100	1	3	42,85
1 05 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100	1	3	60,00
1 05 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100	1	3	60,00
1 05 01 1.06 0007	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket	7	1	1	1	100	1	3	42,85
1 05 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	1	1	1	100	1	3	60,00
1 05 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	1	1	1	100	2	4	50,00
1 05 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	5	1	1	1	100	1	3	60,00
1 05 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	Unit	10	2	2	2	100	2	6	60,00
1 05 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	5	1	1	1	100	1	3	60,00
1 05 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10	2	2	2	100	2	6	60,00
1 05 01 1.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	1	0	0	0	1	2	50,00
1 05 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	100	1	3	60,00
1 05 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	5	1	1	1	100	1	3	60,00

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**  
**RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja 2023			Target 2024	Perkiraan Capaian Target s/d 2024	
										Target	Realisa si	Tingkat (%)		Realisa si Capaian	Tingkat (%)
1					2	3	3.a	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	05	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	22	22	22	22	100	22	22	60,00
1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	37	37	37	37	100	37	37	60,00
1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	2	2	2	100	2	2	60,00
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Pencegahan Bencana	Indeks	3,00	2,36	2,66	2,66	100	2,66	2,66	88,66
						Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Indeks	0,35	0,27	0,48	0,27	56,25	0,48	0,48	137,14
						Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Indeks	0,45	0,31	0,32	0,64	200	0,32	0,42	93,33
1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen	5	1	1	1	100	1	3	60,00
1	05	03	1.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di Kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/ Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/ Kota	Orang	1310	60	600	600	100	50	710	54,19
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Dokumen	34	3	6	6	100	6	15	47,05
1	05	03	1.02	0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/ atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	8	1	0	0	0	0	1	12,5
1	05	03	1.02	0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Orang	120	0	0	0	0	0	0	0
1	05	03	1.02	0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	Dokumen	6	1	0	0	0	1	1	16,66
1	05	03	1.02	0025	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Dokumen	8	0	0	0	0	1	1	12,50
1	05	03	1.02	0026	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/ Kota yang tertangani	Kegiatan	7	1	1	1	100	1	3	42,85

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**  
**RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja 2023			Target 2024	Perkiraan Capaian Target s/d 2024	
										Target	Realisa si	Tingkat (%)		Realisa si Capaian	Tingkat (%)
1					2	3	3.a	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	05	03	1.02	0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC Tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	137	20	22	22	100	22	64	46,71
1	05	03	1.02	0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Keluarga	298	0	48	48	100	60	108	36,24
1	05	03	1.02	0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen	5	0	1	1	100	1	2	40,00
1	05	03	1.02	0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di Kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	270	0	40	40	100	40	80	29,62
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Domunen	22	2	3	3	100	4	9	40,90
1	05	03	1.03	0009	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/ legal	Domunen	2	0	0	0	0	0	0	0
1	05	03	1.03	0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	5	0	0	0	0	1	1	20,00
1	05	03	1.03	0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	50	0	0	0	0	25	25	50,00
1	05	03	1.03	0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	2350	150	460	460	100	300	910	38,72
1	05	03	1.03	0029	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan	2	0	1	1	100	0	1	50,00
1	05	03	1.03	0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	18	2	4	4	100	4	10	55,55
1	05	03	1.03	0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	5	0	0	0	0	1	1	20,00

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**  
**RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja 2023			Target 2024	Perkiraan Capaian Target s/d 2024	
						Target	Realisa si	Tingkat (%)		Realisa si Capaian	Tingkat (%)
1	2	3	3.a	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 05 03 1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Dokumen	34	3	3	3	100	6	12	35,29
1 05 03 1.04 0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	90	0	0	0	0	0	0	0
1 05 03 1.04 0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	14	3	3	3	100	1	7	50,00
1 05 03 1.04 0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kegiatan	3	0	0	0	0	1	1	33,33
1 05 03 1.04 0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Lembaga	0	0	0	0	0	0	0	0
1 05 03 1.04 0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	240	0	0	0	0	40	40	16,66
1 05 03 1.04 0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	6	0	2	2	100	0	2	33,33
1 05 03 1.04 0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	Dokumen	4	0	0	0	0	0	0	0
1 05 03 1.04 0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Dokumen	9	2	2	2	100	1	5	55,55
1 05 03 1.04 0021	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Jumlah SDM aparaturnya penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Orang	40	0	0	0	0	0	0	0
1 05 03 1.04 0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi	Dokumen	5	0	0	0	0	1	1	20,00

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**  
**RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja 2023			Target 2024	Perkiraan Capaian Target s/d 2024	
										Target	Realisa si	Tingkat (%)		Realisa si Capaia n	Tingkat (%)
1					2	3	3.a	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Pemerintahan Daerah (SIPD)									
1	05	03	1.04	0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten / Kota	7	0	7	7	7	7	7	60,00

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 secara keseluruhan relatif baik. Hal ini terlihat dari Capaian Indikator Kinerja kegiatan BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 yang tertuang dalam RPJMD Gubernur Priode 2021-2026 kemudian di tuangkan dalam Restra OPD, dari empat (4) Indikator Kinerja Program yang harus dicapai dari tahun 2021 sampai 2023 secara keseluruhan Indikator Kinerja Program sudah dapat terpenuhi.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimum Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota terdapat beberapa Sub-Urusan Bencana yang belum terlaksana, antara lain:

1. Pembuatan Rencana Kontijensi;  
Pembuatan Dokumen Kontijensi Belum dapat di laksanakan dikarenakan terjadi defisit anggaran sehingga mengharuskan Recofusing pada belanja Tahun Anggaran 2023.
2. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;  
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Dapat di laksanakan jika Dokumen Rencana Kontijensi (renkon) sudah tersedia.
3. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Penanganan Darurat Bencana;  
Akan di laksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025.
4. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana.  
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Penanganan Darurat Bencana dan Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana, dilaksanakan dengan menggabung sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana.

Capaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, Rencana 100, Realisasi 100 (100 %) Sangat Tinggi, telah mencapai target.

Secara rinci capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada Tabel 2.2



**Tabel 2.2.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Kepulauan Riau**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian	Proyeksi		
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2025	Tahun 2026	Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 SAKIP	Nilai	71,05	76,00	78,00	80,00	71,60	78,00	80,00	Dinilai Oleh Inspektorat
2.	Indeks Pencegahan Bencana	Permendagri 101 Tahun 2018 SPM Sub Urusan Bencana	Indeks	2,46	2,60	2,80	3,00	2,66	2,80	3,00	Dinilai Oleh BNPB
	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana			0,30	0,32	0,33	0,35	0,27	0,43	0,45	
	Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana			0,40	0,42	0,43	0,45	0,64	0,64	0,64	

### **2.3 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:
  - 1) Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana;
  - 2) Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
  - 3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - 4) Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana;
  - 5) Masih tersebar dan belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
  - 6) Belum tersosialisasikan secara luas paradigma baru Penanggulangan Bencana;
- b. Tantangan dalam menurunkan Ancaman Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tantangan untuk mendorong dalam memecahkan isu strategis di Provinsi Kepulauan Riau, meliputi:
  - 1) Kondisi alam dan sosial yang rawan terjadi bencana;
  - 2) Terjadinya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam;

- 3) Tingkat pemahaman masyarakat belum merata mengenai paradigma Penanggulangan Bencana;
  - 4) Pertumbuhan dan penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau memiliki jangkauan yang sangat luas;
  - 5) Luas wilayah perairan yang lebih besar di bandingkan dengan daratan;
  - 6) Memiliki potensi bencana iklim yang sangat besar.
- c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:
- 1) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
  - 2) Tingginya partisipasi masyarakat dalam program/ kegiatan kebencanaan;
  - 3) Adanya dukungan dari lembaga/ instansi pemerintahan yang terkait;
  - 4) Adanya dukungan Pemerintah Pusat;
  - 5) Adanya nilai gotong royong, kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat.

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi program antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan perangkat daerah provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka pencapaian kinerja perlindungan masyarakat.
- b. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan di seluruh bidang untuk mendukung pencapaian sasaran perlindungan masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.

## **2.4 Review Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 terdapat perubahan signifikan, hal ini terlihat dari rumusan program dan kegiatan mengacu pada Rencana Strategis BPBD Provinsi Kepulauan Riau menyesuaikan pada Rencana Strategis Perubahan BPBD Provinsi Kepulauan Riau, sehingga dapat meningkatkan serta mampu menjalankan beberapa Sub Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan

atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Namun, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**  
**RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

**Tabel. 2.3.**  
**Review Rancangan Awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>	<b>Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>	<b>100 %</b>	<b>9.659.859.784</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>	<b>Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>10.591.459.285</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	380.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	533.459.285
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	383.459.285
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	80.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	50.000.000
d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	75.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	50.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.160.290.184	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.100.000.000
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/ Bulan	5.485.290.184	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/ Bulan	5.700.000.000
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	600.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	350.000.000
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	50.000.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Paket	138.400.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	150.000.000
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	78.400.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	50.000.000
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	50.000.000
c	Bimbingan Teknis Implementasi Pengaturan Perundang - Undangan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	30.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Pengaturan Perundang - Undangan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	50.000.000

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**  
**RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.251.579.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	510.000.000
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	30.000.000
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	120.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	65.603.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000
e	Penyediaan Bahan/ Material	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Bahan/ Material	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	2 Paket	30.000.000
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.976.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	40.000.000
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	940.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	320.000.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	150.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1.110.000.000
a	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	150.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1.110.000.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1.219.590.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1.883.000.000
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	27.720.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	130.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	130.000.000
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	27.000.000
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.031.870.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.726.000.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	360.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	305.000.000
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	120.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	175.000.000



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**  
**RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
b	Pemeliharaan Mebel	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	30.000.000	Pemeliharaan Mebel	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	30.000.000
d	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	-
e	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	150.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000
II	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	Provinsi Kepulauan Riau	<b>Indeks Pencegahan Bencana</b>	<b>2,80</b>	1.312.838.551	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	Provinsi Kepulauan Riau	<b>Indeks Pencegahan Bencana</b>	<b>2,80</b>	11.016.319.564
			<b>Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana</b>	<b>0,33</b>				<b>Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana</b>	<b>0,33</b>	
			<b>Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana</b>	<b>0,43</b>				<b>Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana</b>	<b>0,43</b>	
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	2 Dokumen	20.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1 Dokumen	700.000.000
a	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di Kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/ Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/ Kota	20 Orang	10.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Kab. Bintan, Kab. Natuna, Kab. Kep. Ananbas, Kab. Karimun, Kab. Lingga, Tanjungpinang dan Batam	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di Kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/ Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/ Kota	500 Orang	700.000.000
b	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	1 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	-	-
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	9 Dokumen	687.838.551	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	9 Dokumen	4.966.319.564
a	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/ atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	10.838.551	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Kab. Natuna, Kab. Kep. Ananbas, Kab. Karimun, Kab. Lingga, Tanjungpinang dan Batam	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/ atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	6 Kawasan	766.319.564
b	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah warga negara dan aparat di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/ Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	10 Orang	20.000.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah warga negara dan aparat di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/ Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	60 Orang	400.000.000
c	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	-	-	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Kab. Natuna dan Kab. Kep. Ananbas	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	2 Dokumen	700.000.000
d	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1 Dokumen	80.000.000	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Kab. Natuna, Kep. Ananbas dan Bintan	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	3 Dokumen	800.000.000

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**  
**RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
e	Pengelolaan Risiko Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/ Kota yang tertangani	1 Kegiatan	65.000.000	Pengelolaan Risiko Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/ Kota yang tertangani	2 Kegiatan	500.000.000
f	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah personil TRC Tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	15 Orang	130.000.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah personil TRC Tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	25 Orang	300.000.000
g	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/ Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	10 Keluarga	20.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/ Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	80 Keluarga	900.000.000
h	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Dokumen	20.000.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Dokumen	300.000.000
i	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di Kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	30 Orang	95.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di Kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	280 Orang	300.000.000
j	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	2 Dokumen	247.000.000	-	-	-	-	-
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	6 Dokumen	380.000.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	6 Dokumen	2.400.000.000
a	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Dokumen	300.000.000
b	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Laporan	10.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	2 Laporan	200.000.000
c	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	-	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	25 Orang	300.000.000
d	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	175.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	600 Orang	800.000.000
e	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	145.000.000	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	4 Laporan	500.000.000
f	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	20.000.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 Laporan	300.000.000

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**  
**RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
g	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	1 Laporan	20.000.000	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	-	-
h	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	1 Laporan	10.000.000	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	-	-
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	3 Dokumen	225.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	11 Dokumen	2.950.000.000
a	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-	-	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Bintan, Kab. Natuna, dan Tanjungpinang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga	300.000.000
b	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun			Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	3 Dokumen	650.000.000
c	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	-	-	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan	150.000.000
d	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	-	-	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	30 Lembaga	150.000.000
e	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	-	-	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	100 Orang	400.000.000
f	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	-	-	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	200.000.000
g	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	-	-	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	2 Dokumen	200.000.000
h	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	2 Dokumen	140.000.000	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	2 Dokumen	200.000.000

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**  
**RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
i	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	20 Orang	200.000.000	
J	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	25.000.000	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	2 Dokumen	400.000.000	
k	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	3 Kabupaten/ Kota	60.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	7 Kabupaten/ Kota	200.000.000	
TOTAL					10.972.698.335	TOTAL					21.607.778.849

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**  
**RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

**Tabel. 2.4.**  
**Usulan Program, Kegiatan Masyarakat Tahun 2025**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Usulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>	<b>Indeks Pencegahan Bencana</b>	<b>3,18</b>	
			<b>Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana</b>	<b>0,44</b>	
			<b>Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana</b>	<b>0,57</b>	
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1 Dokumen	
a	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Kabupaten Bintan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di Kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/ Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/ Kota	70 Orang	BPBD se-Provinsi Kepulauan Riau
		Kabupaten Natuna		70 Orang	
		Kab. Kep. Anambas		70 Orang	
		Kabupaten Karimun		70 Orang	
		Kabupaten Lingga		70 Orang	
		Tanjungpinang		75 Orang	
		Batam		75 Orang	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	9 Dokumen	
a	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kabupaten Natuna	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/ atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	BPBD se-Provinsi Kepulauan Riau
		Kab. Kep. Anambas		1 Kawasan	
		Kabupaten Karimun		1 Kawasan	
		Kabupaten Lingga		1 Kawasan	
		Tanjungpinang		1 Kawasan	
		Batam		1 Kawasan	
b	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Kabupaten Natuna	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	1 Dokumen	BPBD Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas
		Kab. Kep. Anambas		1 Dokumen	
c	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Kabupaten Natuna	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1 Dokumen	BPBD Kab. Natuna, Kab. Kep. Anambas dan Kab. Bintan
		Kab. Kep. Anambas		1 Dokumen	
		Kabupaten Bintan		1 Dokumen	
d	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Kabupaten Bintan	Jumlah personil TRC Tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	3 Orang	BPBD se-Provinsi Kepulauan Riau
		Kabupaten Natuna		3 Orang	
		Kab. Kep. Anambas		3 Orang	
		Kabupaten Karimun		3 Orang	

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**  
**RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

		Kabupaten Lingga		3 Orang	
		Tanjungpinang		3 Orang	
		Batam		3 Orang	
e	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kabupaten Bintan	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/ Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	40 keluarga	BPBD se-Provinsi Kepulauan Riau
		Kabupaten Natuna		40 keluarga	
		Kab. Kep. Anambas		40 keluarga	
		Kabupaten Karimun		40 keluarga	
		Kabupaten Lingga		40 keluarga	
		Tanjungpinang		40 keluarga	
		Batam		40 keluarga	
f	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kabupaten Bintan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di Kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	3 Orang	BPBD se-Provinsi Kepulauan Riau
		Kabupaten Natuna		3 Orang	
		Kab. Kep. Anambas		3 Orang	
		Kabupaten Karimun		3 Orang	
		Kabupaten Lingga		3 Orang	
		Tanjungpinang		3 Orang	
		Batam		3 Orang	
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	6 Dokumen	
a	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Kabupaten Bintan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2 orang	BPBD se-Provinsi Kepulauan Riau
		Kabupaten Natuna		2 orang	
		Kab. Kep. Anambas		2 orang	
		Kabupaten Karimun		2 orang	
		Kabupaten Lingga		2 orang	
		Tanjungpinang		2 orang	
		Batam		2 orang	
b	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kabupaten Bintan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	85 orang	BPBD se-Provinsi Kepulauan Riau
		Kabupaten Natuna		85 orang	
		Kab. Kep. Anambas		85 orang	
		Kabupaten Karimun		85 orang	
		Kabupaten Lingga		85 orang	
		Tanjungpinang		85 orang	
		Batam		85 orang	
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	11 Dokumen	
a	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kabupaten Bintan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	20 Keluarga	BPBD Kab. Natuna, Kab. Bintan dan Tanjungpinang
		Kabupaten Natuna		20 Keluarga	
		Tanjungpinang		20 Keluarga	

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**  
**RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

b	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Kabupaten Bintan	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	10 orang	BPBD se-Provinsi Kepulauan Riau
		Kabupaten Natuna		10 orang	
		Kab. Kep. Anambas		10 orang	
		Kabupaten Karimun		10 orang	
		Kabupaten Lingga		10 orang	
		Tanjungpinang		10 orang	
		Batam		10 orang	
c	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Kabupaten Bintan	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	2 orang	BPBD se-Provinsi Kepulauan Riau
		Kabupaten Natuna		2 orang	
		Kab. Kep. Anambas		2 orang	
		Kabupaten Karimun		2 orang	
		Kabupaten Lingga		2 orang	
		Tanjungpinang		2 orang	
		Batam		2 orang	

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1 Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional**

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan Nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan Pembangunan Nasional Dengan Visi Presiden 2020 – 2024 yaitu:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.**

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan BNPB pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yaitu bagaimana negara mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana, serta membangun budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana.

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka pencapaian visi BNPB 2020 – 2024 adalah :

**“BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong”**



Maka ditetapkan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana;
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi;
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan;
4. Menetapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sebagai penjabaran atas visi dan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan, adalah:

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana;
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi;
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan;
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Adapun sasaran strategis berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang akan dicapai meliputi:

1. Menurunkan risiko bencana di daerah rawan bencana;
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana;
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana;
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Penetapan arah kebijakan Penanggulangan Bencana yang akan menjadi dasar bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2020 – 2024 untuk menetapkan arah kebijakan dan strategi sangat terkait dengan arah kebijakan dalam

perencanaan pembangunan nasional jangka menengah 2020 – 2024, sebagai gambaran umum berdasarkan pemasalahan, tujuan dan sasaran yang diidentifikasi, maka rancangan arah kebijakan 2020 – 2024 adalah:

1. Peningkatan sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif.
2. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana.
3. Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
4. Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna mendukung pencapaian kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas.
5. Penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah.
6. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.

Selanjutnya, strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah:

1. Penguatan sistem, regulasi, strategi dan tata kelola penanggulangan bencana.
2. Penguatan data, informasi dan literasi kebencanaan.
3. Integrasi kebijakan dan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana.
4. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.
5. Penguatan penanganan darurat bencana.
6. Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan.
7. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan pada Rencana Strategis perangkat Daerah merupakan sebuah penjabaran atau implementsai dari pernyataan misi dan tujuan serta sasaran yang termuat dalam RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran pada rencana strategis merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2021-2026 yaitu:

**“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau  
yang Tanggap, Tangkas Dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana”**

Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Ketahanan Daerah;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya tahun 2025 disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.

**Tabel. 3.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Target Indikator Tujuan/ Sasaran	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau yang Tanggap, Tangkas dan Tangguh dalam Menghadapi Bencana		Indeks Kapasitas Daerah (Indeks)	0,49			
		Meningkatnya Kualitas Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0,49	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Pencegahan Bencana	2,80
						Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana	3,33
						Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,43
2	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (kategori)	BB			
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)	78,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	100

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau ini direncanakan untuk pencapaian visi misi kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Perubahan Kepulauan Riau 2021 – 2026 dalam urusan penanggulangan bencana sebagaimana indikator-indikator yang telah ditetapkan. Selain itu rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ini diusulkan untuk pencapaian dan mensukseskan program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024.

Pada Ranhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini diusulkan 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan, Ranhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 dengan total keseluruhan sebesar **Rp.21.607.778.849,- (dua puluh satu milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah)** dengan pembiayaan sepenuhnya dibebankan kepada APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, Khusus Gaji ASN dan PPPK dibebankan kepada APBN/ Transfer Dana Alokasi Umum (DAU).

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Akhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, Berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026, yang merupakan turunan dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026.

Dokumen Renstra dan RPJMD Merupakan penjabaran dari Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam mencapai sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil Analisa kebutuhan sesuai dengan Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**  
**RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

**Tabel 4.1.**  
**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau yang Tanggap, Tangkas Dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana				Indeks Kapasitas Daerah (Indeks)	0,40	0,44		0,49		0,54		0,54			
	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Daerah			Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0,40	0,44		0,49		0,54		0,54			
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Pencegahan Bencana (Dengan Satuan:Indeks)	2,36	2,60	2.962.102.309	2,80	12.216.319.564	3,00	14.188.094.771	3,00	29.366.516.644	KEPALA PELAKSANA		
			Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana (Dengan Satuan:Indeks)	0,27	0,32		0,33		0,35		KEPALA PELAKSANA				
			Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana (Dengan Satuan:Indeks)	0,31	0,42		0,43		0,45		KEPALA PELAKSANA				
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	144.292.810	1	700.000.000	2	1.338.094.771	4	2.182.387.581	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN		
	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	60	50	144.292.810	500	700.000.000	700	1.038.094.771	1250	1.882.387.581	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN		
	1.05.03.1.01.03	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	0	1	300.000.000	1	300.000.000	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN		
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Dengan Satuan:Dokumen)	9	6	903.659.885	9	6.166.319.564	10	6.400.000.000	25	13.469.979.449	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN		
	1.05.03.1.02.12	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	0	2	700.000.000	3	800.000.000	5	1.500.000.000	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN		
	1.05.03.1.02.13	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Dengan Satuan:Kawasan)	1	0	0	3	766.319.564	4	800.000.000	7	1.566.319.564	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN		

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**  
**RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.05.03.1.02.14	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalikan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	71.662.835	2	1.500.000.000	1	300.000.000	4	1.871.662.835	BIDANG KEDARURATAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB) & LOGISTI	
		1.05.03.1.02.15	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Dengan Satuan:Orang)	20	22	70.000.000	25	300.000.000	70	800.000.000	117	1.170.000.000	BIDANG KEDARURATAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB) & LOGISTI	
		1.05.03.1.02.16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana (Dengan Satuan:Orang)	50	40	76.587.250	80	300.000.000	100	400.000.000	220	776.587.250	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	
		1.05.03.1.02.17	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	145.127.600	3	800.000.000	3	800.000.000	7	1.745.127.600	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	
		1.05.03.1.02.18	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalikan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	0	1	300.000.000	1	300.000.000	BIDANG KEDARURATAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB) & LOGISTI	
		1.05.03.1.02.19	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparat di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	60	400.000.000	60	400.000.000	120	800.000.000	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	
		1.05.03.1.02.20	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/kota yang tertangani (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	1	47.745.200	2	500.000.000	2	500.000.000	5	1.047.745.200	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	
		1.05.03.1.02.21	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Dengan Satuan:Unit)	48	60	492.537.000	80	900.000.000	110	1.300.000.000	250	2.692.537.000	BIDANG KEDARURATAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB) & LOGISTI	
		1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Dengan Satuan:Dokumen)	5	4	1.415.581.554	6	2.400.000.000	7	2.800.000.000	17	6.615.581.554	BIDANG KEDARURATAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB) & LOGISTI	
		1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (Dengan Satuan:Laporan)	6	4	951.555.424	4	500.000.000	4	500.000.000	12	1.951.555.424	BIDANG KEDARURATAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB) & LOGISTI	



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**  
**RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.05.03.1.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	47.294.200	2	200.000.000	2	200.000.000	5	447.294.200	BIDANG KEDARURATAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB) & LOGISTI	
		1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Dengan Satuan:Orang)	750	300	391.648.000	600	800.000.000	700	1.000.000.000	1600	2.191.648.000	BIDANG KEDARURATAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB) & LOGISTI	
		1.05.03.1.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	25.083.930	2	300.000.000	2	300.000.000	5	625.083.930	BIDANG KEDARURATAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB) & LOGISTI	
		1.05.03.1.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit (Dengan Satuan:Laporan)	1	0	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	BIDANG KEDARURATAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB) & LOGISTI	
		1.05.03.1.03.07	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	1	300.000.000	1	300.000.000	2	600.000.000	BIDANG KEDARURATAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB) & LOGISTI	
		1.05.03.1.03.08	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	25	300.000.000	25	300.000.000	50	600.000.000	BIDANG KEDARURATAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB) & LOGISTI	
		1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (Dengan Satuan:Dokumen)	6	6	498.568.060	11	2.950.000.000	11	3.650.000.000	28	7.098.568.060	BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	
		1.05.03.1.04.06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Dengan Satuan:Keluarga)	0	0	0	40	300.000.000	50	400.000.000	90	700.000.000	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	
		1.05.03.1.04.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	6	1	164.310.700	3	450.000.000	4	950.000.000	8	1.564.310.700	BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	
		1.05.03.1.04.09	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan (Dengan Satuan:Kegiatan)	0	1	77.315.200	1	150.000.000	1	150.000.000	3	377.315.200	BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**  
**RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.05.03.1.04.10	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Dengan Satuan:Lembaga)	0	0	0	30	150.000.000	30	150.000.000	60	300.000.000	BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	
		1.05.03.1.04.13	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Dengan Satuan:Orang)	0	40	106.864.000	100	400.000.000	100	400.000.000	240	906.864.000	BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	
		1.05.03.1.04.15	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	20	200.000.000	20	200.000.000	40	400.000.000	BIDANG KEDARURATAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB) & LOGISTI	
		1.05.03.1.04.16	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	0	0	2	400.000.000	2	400.000.000	4	800.000.000	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	
		1.05.03.1.04.17	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	74.062.000	2	400.000.000	2	400.000.000	5	874.062.000	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	
		1.05.03.1.04.18	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	2	100.000.000	2	100.000.000	4	200.000.000	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	
		1.05.03.1.04.19	Kerja Sama Antar Lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) (Dengan Satuan:Dokumen)	4	1	9.089.560	2	200.000.000	2	300.000.000	5	509.089.560	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	
		1.05.03.1.04.20	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana (Dengan Satuan:kabupaten/ kota)	7	7	66.926.600	7	200.000.000	7	200.000.000	7	466.926.600	BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (Kategori)	BB	BB		BB		BB		BB			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)	71,05	76,00		78,00		80,00		80,00			

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**  
**RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Dengan Satuan:Persen)	100	100	8.844.126.351	100	9.391.459.285	100	9.673.203.064	100	27.908.788.700	KEPALA PELAKSANA	
		1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	6	3	234.280.570	4	283.459.285	4	292.203.064	11	809.942.919	SEKRETARIAT	
		1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	2	136.073.455	3	133.459.285	3	142.203.064	8	411.735.804	SEKRETARIAT	
		1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	2	50.000.000	2	50.000.000	4	100.000.000	SEKRETARIAT	
		1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	3	1	39.820.737	2	50.000.000	2	50.000.000	5	139.820.737	SEKRETARIAT	
		1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	58.386.378	4	50.000.000	4	50.000.000	12	158.386.378	SEKRETARIAT	
		1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	3	6.101.912.926	3	6.100.000.000	3	6.100.000.000	9	18.301.912.926	SEKRETARIAT	
		1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/ Bulan)	24	24	5.721.015.988	24	5.700.000.000	24	5.700.000.000	24	17.121.015.988	SEKRETARIAT	
		1.05.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	4	2	348.662.880	2	350.000.000	2	350.000.000	6	1.048.662.880	SEKRETARIAT	
		1.05.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	32.234.058	2	50.000.000	2	50.000.000	5	132.234.058	SEKRETARIAT	
		1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	2	300.000.000	SEKRETARIAT	
		1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	2	0	0	2	50.000.000	2	50.000.000	4	100.000.000	SEKRETARIAT	
		1.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	2	0	0	4	50.000.000	4	50.000.000	8	100.000.000	SEKRETARIAT	
		1.05.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	4	50.000.000	4	50.000.000	8	100.000.000	SEKRETARIAT	

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**  
**RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	1	611.781.868	1	510.000.000	1	580.000.000	3	1.701.781.868	SEKRETARIAT	
		1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	1	67.175.178	1	50.000.000	1	70.000.000	3	187.175.178	SEKRETARIAT	
		1.05.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	1	15.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	5	75.000.000	SEKRETARIAT	
		1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	1	55.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	115.000.000	SEKRETARIAT	
		1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	1	30.354.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	50.354.000	SEKRETARIAT	
		1.05.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	1	15.000.000	2	30.000.000	2	50.000.000	5	95.000.000	SEKRETARIAT	
		1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	2	1	39.514.006	1	40.000.000	1	70.000.000	3	149.514.006	SEKRETARIAT	
		1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	389.738.684	2	320.000.000	2	320.000.000	6	1.029.738.684	SEKRETARIAT	
		1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	1	150.173.160	1	160.000.000	1	160.000.000	3	470.173.160	SEKRETARIAT	
		1.05.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	4	2	150.173.160	2	160.000.000	2	160.000.000	6	470.173.160	SEKRETARIAT	
		1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	1	1.490.977.827	1	1.883.000.000	1	1.911.000.000	3	5.284.977.827	SEKRETARIAT	
		1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	2	130.000.000	2	130.000.000	2	150.000.000	6	410.000.000	SEKRETARIAT	
		1.05.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	23.728.000	1	27.000.000	1	35.000.000	3	85.728.000	SEKRETARIAT	
		1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	3	2	1.337.249.827	2	1.726.000.000	2	1.726.000.000	6	4.789.249.827	SEKRETARIAT	
		1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	1	255.000.000	1	305.000.000	1	480.000.000	3	1.040.000.000	SEKRETARIAT	

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**  
**RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	22	22	175.000.000	22	175.000.000	22	200.000.000	22	550.000.000	SEKRETARIAT	
		1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	24	37	30.000.000	37	30.000.000	37	40.000.000	37	100.000.000	SEKRETARIAT	
		1.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	2	50.000.000	2	100.000.000	2	240.000.000	2	390.000.000	SEKRETARIAT	
TOTAL:						11.806.228.660		21.607.778.849		23.861.297.835		57.275.305.344			

## **BAB V** **PENUTUP**

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan taktis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau. Isi dari Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama.
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder penanggulangan bencana dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan tangguh bencana yang dilakukan oleh penanggulangan bencana Provinsi Kepulauan Riau.

Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini berisikan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan-kegiatan.



Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini perlu ditunjang dengan petunjuk operasional maupun rencana tindak lanjut yang lebih rinci untuk setiap item program/kegiatannya. Dukungan yang optimal dari Pemerintah Kabupaten/ Kota, masyarakat dan stakeholder Penanggulangan Bencana sangat diharapkan untuk menyukseskan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 4 Juli 2024

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**DR. MUHAMMAD HASBI, M.Si**  
Pembina Utama Madya/ IV.d  
NIP. 19660228 198602 1 006